

STRATEGI BISNIS DENGAN MEMANFAATKAN PERLINDUNGAN HUKUM KEKAYAAN INTELEKTUAL KHUSUSNYA RAHASIA DAGANG

Oleh : Noegroho Amien Soetiarto*

I. Pendahuluan

Isu persaingan global mulai mencuat dengan ditandai meredanya era perang dingin antara Blok Barat dan Blok Timur yang diikuti dengan menurunnya peran industri militer yang menyebabkan arus informasi modal dan teknologi khususnya yang semula banyak tertimbun di jenis industri perang bergeser ke industri sipil (non perang) yang relatif terbuka dan rawan terhadap persaingan serta peniruan ataupun pembajakan. Sebagai tindak lanjut dari persaingan penjualan barang-barang hasil industri sipil diperlukan sarana hukum yang dapat melindungi secara efektif suatu teknologi yang dipergunakan dalam pembuatan atau pemrosesan hasil industri yang bersangkutan. Sarana perlindungan hukum untuk teknologi guna membuat atau memproses hasil produksi tersebut di atas sangat diperlukan, mengingat akhir-akhir ini kemajuan pesat di bidang teknologi, informasi, komunikasi dan transportasi turut berperan di dalam perdagangan dunia.

Menurut Soetiarto, teknologi merupakan suatu ilmu pengetahuan yang diterapkan dalam industri¹. Teknologi lahir dari kegiatan penelitian dan pengembangan yang dilakukan oleh Lembaga Penelitian dan Pengembangan yang lazimnya disingkat Lemlit atau Balitbang dari suatu pabrik, institusi negeri atau swasta bahkan oleh Perguruan Tinggi. Kegiatan penelitian dan atau pengembangan dapat melahirkan suatu karya intelektual manusia. Dikarenakan hasil karya intelektual manusia ini mem-

punyai nilai guna, nilai ekonomi dan dapat diproses dalam industri serta memerlukan pengorbanan atau dukungan biaya, waktu, tenaga dan pikiran, maka sudah pada tempatnya bila penemuan yang merupakan hasil karya intelektual tersebut mendapat perlindungan hukum.

Tujuan perlindungan hukum atas hasil karya intelektual tersebut di atas dimaksudkan untuk memberi kejelasan hukum mengenai hubungan antara ciptaan atau temuan yang merupakan hasil karya intelektual manusia dengan si penemu/pencipta atau pemegang hak dengan pemakai yang mempergunakan hasil karya intelektual tersebut. Adanya kejelasan hukum atas kepemilikan hasil karya intelektual yang merupakan hak kebendaan adalah merupakan pengakuan hukum serta pemberian imbalan yang diberikan kepada seseorang atas usahanya dan hasil karya kreatif manusia yang telah ditemukan atau diciptakan.

Hasil karya intelektual dikatakan sebagai hak milik dikarenakan usaha untuk mendapatkan hasil karya intelektual tersebut memerlukan modal yang berupa biaya, waktu, tenaga dan pikiran, maka hak atas temuan tersebut merupakan hak milik yang berupa hak atas kekayaan intelektual merupakan hak kebendaan yang bersifat *im-materiil* atau *intangible*.

Dewasa ini hak atas kekayaan intelektual merupakan aset bisnis serta merupakan bagian integral dari proses bisnis serta merupakan suatu strategi bisnis dalam rangka keberhasilan bisnis atau perdagangan. Di sisi lain dalam kegiatan bisnis kadang istilah bisnis itu sendiri

* S.H., M.Si., Pengajar Fakultas Hukum UGM

¹ Soetiarto, Noegroho Amien, 1998, *Tinjauan Aspek Hukum Dalam Proses Mematenkan Hasil Penelitian Perguruan Tinggi*, Makalah sarasehan Sosialisasi HaKI dan Strategi Proses Mematenkan Hasil Penelitian Perguruan Tinggi, Lembaga Penelitian UGM, halaman 1.

disamakan dengan perdagangan. Secara yuridis yang dikenal dalam peraturan perundangan, perdagangan adalah kegiatan jual beli barang atau jasa yang dilakukan secara terus menerus dengan tujuan pengalihan hak atas barang atau jasa dengan suatu imbalan.²

Mengingat dewasa ini kemajuan pesat di bidang teknologi, informasi, komunikasi dan transportasi, maka berdasarkan alasan ini pula globalisasi perdagangan yang bersamaan dengan kemajuan di bidang teknologi, informasi, komunikasi dan transportasi sebagaimana dikemukakan tersebut di atas, turut memicu globalisasi hak atas kekayaan intelektual. Keterlibatan teknologi dalam perdagangan dunia menunjukkan bahwa hak atas kekayaan intelektual juga ikut mendunia. Keberadaan hak atas kekayaan intelektual pada proses produksi telah hadir pada kegiatan bisnis sejak awal produksi hingga pemasarannya.

Indonesia merupakan suatu negara yang berdaulat yang tidak mungkin terlepas dalam perdagangan dunia yang dalam pelaksanaannya akan menghadapi hambatan, tantangan ataupun ketidakpastian pasar bahkan mungkin menghadapi persaingan antar negara. Ketidakpastian terhadap perkembangan ekonomi dunia kadang juga dilatarbelakangi oleh perubahan-perubahan yang secara cepat terjadi, baik itu dalam kehidupan politik, sosial ekonomi maupun pertahanan keamanan.

Salah satu faktor yang ikut mempengaruhi perekonomian dan perdagangan dunia adalah tatanan perdagangan yang merupakan dasar dalam hubungan perdagangan antar negara. Tatanan dimaksud adalah mengenai Persetujuan Umum Mengenai Tarif dan Perdagangan yang mana tatanan tersebut sangat dikenal dengan *General Agreement on Tariffs and Trade* lazim disingkat dengan *GATT*. Bagi Indonesia manfaat keikutsertaan dalam Persetujuan ini (*GATT*) selain Persetujuan tersebut memungkinkan terbukanya peluang pasar

internasional yang lebih luas, Persetujuan tersebut juga menyediakan kerangka perlindungan multilateral yang lebih baik bagi kepentingan nasional dalam rangka melaksanakan perdagangan internasional khususnya dengan mitra dagangnya.

Lembaga *GATT* itu sendiri dalam pelaksanaannya dapat dikatakan tidak mulus sebagaimana yang diharapkan, hal tersebut terjadi mengingat kepentingan ataupun kemampuan negara-negara peserta persetujuan itu tidak sama. Walaupun demikian penyelesaian masalah itu diselesaikan melalui perundingan-perundingan multilateral di bidang perdagangan dan dilakukan lewat putaran-putaran perundingan yang dikenal dengan istilah *round*. Putaran yang ada korelasi dengan pembahasan ini menurut hemat penulis adalah Putaran Uruguay karena tujuan Putaran ini adalah menciptakan sistem perdagangan internasional yang lebih bebas dan adil, namun selain itu mencakup juga bahasan perlindungan mengenai aspek-aspek perdagangan yang berkaitan dengan hak atas kekayaan intelektual, di samping membahas kebijakan investasi yang berkaitan dengan perdagangan.

Secara umum naskah pokok Persetujuan Putaran Uruguay mencakup hal sebagai berikut:

1. Persetujuan Akhir yang memuat Hasil-hasil Perundingan Perdagangan Multilateral Putaran Uruguay (*Final Act Embodying the Result of the Uruguay Round of Multilateral Trade Negotiations*) yang berisi rangkuman mengenai hasil-hasil yang dicapai dalam perundingan Putaran Uruguay.
2. Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia (*Agreement Establishing the World Trade Organization*), merupakan persetujuan pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia disertai beberapa naskah persetujuan yang dijadikan lampiran pada Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia. Satu di antara

² Pasal 1 Surat Keputusan Menteri Perdagangan RI Nomor 1458/Kp/XII/84 Tentang Surat Ijin Usaha Perdagangan, tertanggal 19 Desember 1984.

lampiran tersebut adalah persetujuan mengenai Persetujuan mengenai Aspek-aspek Dagang yang Terkait dengan Hak atas Kekayaan Intelektual, termasuk perdagangan barang palsu atau lebih dengan istilah *TRIPs* yang merupakan kependekan dari *Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Right, Including Trade in Counterfeit Goods*. Semula dalam paket Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia ini dimaksudkan sebagai pengganti Sekretaris *GATT* yang selanjutnya akan mengadministrasikan dan mengawasi pelaksanaan persetujuan perdagangan serta menyelesaikan sengketa dagang di antara para negara anggota.

3. Keputusan dan Deklarasi Menteri (*Ministerial Decisions and Declarations*) yang berisi Deklarasi-deklarasi atau Keputusan-keputusan tingkat Menteri mengenai pelaksanaan persetujuan-persetujuan yang berhasil dicapai.

II. Eksistensi dan Perlindungan Hak Atas Kekayaan Intelektual

Hak atas Kekayaan Intelektual disingkat HaKI atau HKI adalah padanan kata *Intellectual Property Right* adalah hak yang berkenaan dengan kekayaan yang timbul atau lahir karena kemampuan intelektual manusia yang berupa penemuan-penemuan atau ciptaan di bidang teknologi, ilmu pengetahuan, seni dan sastra. HaKI merupakan suatu hak milik yang berada dalam lingkup kehidupan teknologi, ilmu pengetahuan, seni dan sastra. Perlindungan hukum atas kepemilikan tersebut bukannya ditujukan terhadap barangnya, melainkan terhadap hasil kemampuan intelektual manusia yaitu ekspresi dari suatu gagasan yang telah diwujudkan dan bukannya melindungi gagasannya. Ekspresi dari gagasan tersebut

telah diungkap dan memiliki nilai tambah dan nilai komersial. Gagasan tersebut harus sudah berbentuk sesuatu hasil yang dapat dilihat, dibaca, atau didengar maupun dipergunakan secara praktis. Bandingkan dengan pendapat Cornish yang mengatakan bahwa milik intelektual melindungi ide dan informasi yang mempunyai nilai komersial atau nilai ekonomi.³ Bandingkan pula misalnya dengan Penjelasan UU Nomor 12 Tahun 1997 Tentang Hak Cipta – Angka 1, ...” Suatu karya cipta harus memiliki bentuk yang khas dan menunjukkan keahlian sebagai ciptaan seseorang atas dasar kemampuan dan kreatifitas yang bersifat pribadi. Dalam bentuk yang khas artinya karya tersebut harus telah selesai diwujudkan sehingga dapat dilihat, didengar atau dibaca.....” Di sisi lain Taylor mengatakan bahwa yang dilindungi oleh hak cipta adalah ekspresi atau keberadaan dari suatu ide atau gagasan, dan bukannya melindungi ide itu sendiri. Dari uraian di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa hak atas kekayaan telah berbentuk atau berwujud. Di samping itu ada persyaratan tambahan bahwa hasil karya intelektual itu dapat memecahkan masalah tertentu di bidang teknologi, dapat berupa proses atas hasil produksi atau penyempurnaan dan pengembangan proses atau hasil produksi, maupun hasil karya intelektual tersebut berupa tanda yang memiliki daya pembeda dengan yang lain ataupun hasil tersebut berupa suatu karya yang dapat dinikmati.

Pada awalnya hasil kreatif manusia atau *human creativity* dan juga yang berupa usaha atau hasil yang kreatif manusia atau *human effort* disebarluaskan/diberitahukan dan diajarkan atau ditularkan begitu saja pada orang lain – sebagai suatu ibadah – sehingga setiap orang dapat mempergunakan ataupun memakai bahkan memasarkan hasil produksi yang mempergunakan cara hasil karya kreatif atau hasil temuan begitu saja, tanpa konsekuensi maupun imbalan apapun kepada penemu hasil

³ Cornish, W.R. 1989, *Intellectual Property*, Sweet Maxwell, 2 nd Edition, London, halaman 5.

⁴ Taylor, L.J. Copyright For Librarians, Tamarisk Books Hasting, East Sussex, 1 st Edition, halaman 8

karya kreatif itu. Namun di dalam perkembangannya, seandainya hasil karya kreatif manusia yang merupakan hasil karya intelektual tersebut dijadikan lahan atau obyek kegiatan bisnis, dilihat dari rasa keadilan serta penghargaan terhadap penemuan hasil karya kreatif manusia, dirasa kurang pada tempatnya karena belum mencerminkan pemberian penghargaan terhadap jerih payah usaha seseorang. Hal ini dapat dimaklumi karena untuk mendapatkan hasil karya tersebut si penemu ataupun si pencipta telah mengorbankan waktu, tenaga dan pikiran serta memerlukan dukungan biaya yang jumlahnya relatif tidak sedikit jumlahnya. Oleh karena itu dalam perkembangannya dirasa perlu adanya suatu perlindungan hukum terhadap hasil karya intelektual tersebut.

Tujuan perlindungan hukum atas HaKI tersebut dimaksudkan untuk memberi kejelasan hukum mengenai hubungan hukum antara ciptaan/penemuan yang merupakan hasil karya intelektual tersebut dengan si pencipta atau si penemu atau pemegang hak dengan pemakai yang mempergunakan hasil karya tersebut. Adanya kejelasan hukum atas kepemilikan HaKI adalah merupakan pengakuan hukum serta pemberian imbalan yang diberikan kepada seseorang atas usaha dan hasil karya kreatif manusia yang telah diciptakan atau ditemukan. Sebagai konsekuensi lebih lanjut berarti pihak yang menemukan hasil karya intelektual dapat melaksanakan kehendaknya karena hakekat dari kepentingan tersebut mengandung kekuasaan yang dilindungi serta dijamin oleh hukum. Orang yang telah berhasil menemukan hak atas kekayaan intelektual selalu mempunyai kepentingan atas hasil karyanya. Sejalan dengan hal tersebut di atas menurut Mertokusumo hak adalah kepentingan yang dilindungi oleh hukum. Kepentingan pada hakekatnya mengandung kekuasaan yang dijamin dan dilindungi hukum dalam melaksanakannya

Dewasa ini HaKI merupakan aset bisnis dan merupakan bagian integral dari proses bisnis serta merupakan strategi bisnis dalam rangka keberhasilan usaha bisnis atau perdagangan di dunia ini, oleh karena itu adalah wajar apabila HaKI dituangkan dalam Perse-tujuan pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia (WTO).

Sebenarnya Indonesia telah memiliki peraturan perundangan yang mengatur dan memberi perlindungan hukum terhadap HaKI sebelum WTO itu dibentuk, yaitu antara lain:

1. UU Nomor 6 Tahun 1982 yang kemudian dirubah dan ditambah dengan UU Nomor 7 Tahun 1987 Tentang Hak Cipta.
2. UU Nomor 21 Tahun 1961 Tentang Merek Perniagaan dan Merek Perusahaan yang kemudian diganti dengan UU Nomor 19 Tahun 1992 Tentang Merek.
3. UU Nomor 6 Tahun 1989 Tentang Paten
4. UU Nomor 7 Tahun 1986 Tentang Perindustrian yang di dalamnya diatur mengenai desain industri.

Namun peraturan perundangan tersebut di atas belum sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang dimuat dalam Lampiran Keputusan Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia (WTO).

Dikarenakan pada tahun 1994 Indonesia telah meratifikasi Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1994 Tentang Penge-sahan *Agreement Establishing the World Trade Organization* yang di dalam persetujuan tersebut juga dicantumkan *Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights/ TRIPs*, maka sebagai konsekuensinya Indonesia harus menyediakan sarana hukum kepada pemilik HaKI untuk mencegah perolehan, pengungkapan atau penggunaan hak tersebut tanpa seizin pemiliknya. Penggunaan hak tanpa izin

⁵ Mertokusumo, Sudikno, 1996, *Mengenal Hukum, Suatu Pengantar*, Penerbit Liberty, Yogyakarta, Cetakan keempat, halaman 41.

itu bertentangan dengan praktek perdagangan yang sah. Meskipun Indonesia telah memiliki perangkat HaKI namun dikarenakan belum sesuai dengan ketentuan WTO maka harus merevisi perangkat hukum yang mengatur tentang HaKI yang telah dimilikinya dan untuk merealisasikan revisi perangkat hukum tersebut kepada masyarakat Indonesia, Indonesia menerapkan atau mempergunakan *Article 65 TRIPs* – negara anggota paling lambat 1 Januari 2000 telah melakukan penyesuaian dengan ketentuan yang disetujui bersama dalam TRIPs.

Indonesia pada tahun 1997 telah merevisi ketentuan perundangan yang berkaitan dengan HaKI, antara lain :

1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1997 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1987 Tentang Hak Cipta.
2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1997 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 1989 Tentang Paten.
3. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1997 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 19 Tahun 1992 Tentang Merek.

Bersamaan dengan diundangkannya revisi peraturan tentang HaKI sebagaimana yang diuraikan di atas, Pemerintah juga meratifikasi persetujuan-persetujuan internasional di bidang HaKI, yaitu :

- a. Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 1997 Tentang Pengesahan *The Paris Convention For The Protection on Industrial Property and Convention Establishing The World Intellectual Property Organization*.
- b. Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 1997 Tentang Pengesahan *The Patent Cooperation (PCT) and Regulation under PCT*.
- c. Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 1997 Tentang Pengesahan *The Trade Mark Law Treaty*.
- d. Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1997 Tentang Pengesahan *Berne Convention for Protection of Literary and Artistic Works*.
- e. Keputusan Presiden Nomor 19 tahun 1997

Tentang Pengesahan *WIPO Copy Rights Treaty*.

Di samping perbaikan peraturan perundangan yang telah dimiliki Indonesia serta adanya Keputusan-keputusan Presiden sebagaimana diuraikan di atas, pada akhir tahun 2000 yang telah lalu, tepatnya pada tanggal 20 Desember 2000, Indonesia juga telah mengeluarkan peraturan perundangan yang berkaitan dengan HaKI dan sebagai kelanjutan dari Pemerintah untuk melengkapi peraturan perundangan di bidang HaKI, yaitu ;

- a. Undang-undang Nomor 29 Tahun 2000 Tentang Perlindungan Varitas Tanaman.
- b. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2000 Tentang Rahasia Dagang.
- c. Undang-undang Nomor 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri.
- d. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2000 Tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu.

Selain dari Undang-Undang sebagaimana yang telah diundangkan pada akhir tahun 2000 tersebut di atas Pemerintah juga telah selesai menyempurnakan RUU tentang Hak Cipta dan RUU tentang Merek dan keduanya tengah dalam pembahasan di DPR.

Adanya bermacam-macam jenis peraturan perundangan di bidang HaKI tersebut di atas dimaksudkan untuk melindungi hasil karya intelektual manusia sebab jenis dan bidang hasil karya satu dengan yang lain tidak sama, hasil karya intelektual obyeknya dapat di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra ataupun hasil karya itu berupa temuan temuan yang dapat memecahkan masalah di bidang teknologi dan dapat diproses dalam industri. Pembagian obyek perlindungan hasil karya tersebut ada dua versi, yaitu :

- a. Pembagian atau pengelompokan berdasarkan Konvensi Pembentukan *WIPO* atau *Convention Establishing The World Intellectual Property Organization*.
- b. Pembagian atau pengelompokan berdasarkan Lampiran IC Kesepakatan Pembentukan *WTO* / Organisasi Perdagangan Dunia

atau *Agreement Establishing the World Organization*.

Pengelompokan atau pembagian perlindungan hasil karya menurut *WIPO* dapat dirinci sebagai berikut, yaitu :

1. Hak Cipta (*Copy Rights*)
2. Hak Milik Industrial (*Industrial Property*) terdiri dari :
 - a. Paten
 - b. Merek
 - c. Desain Produk Industri
 - d. Penanggulangan Persaingan Curang

Pengelompokan atau pembagian menurut *WTO* hak atas kekayaan intelektual dapat dirinci ke dalam beberapa jenis, yaitu :

1. Hak cipta dan hak-hak yang terkait lainnya
2. Merek
3. Paten
4. Indikasi Geografi
5. Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu
6. Perlindungan terhadap *Undisclosed Information*
7. Pengendalian Terhadap Praktek-praktek perjanjian yang tidak sehat dalam kreasi

III. Rahasia Dagang Bagian Intergral Dari Proses Bisnis

Globalisasi perdagangan tidak dapat dilepaskan dari proses menguasai pasar skala dunia untuk dapat memasarkan hasil produk sebanyak-banyaknya. Di era ini negara-negara maju berkeinginan tetap mempertahankan keunggulan kompetitif mereka terhadap negara berkembang yang dijadikan pasar mereka. Upaya mereka itu dilakukan dengan berbagai cara, satu diantaranya dilakukan dengan cara memanfaatkan berbagai isu dunia, antara lain demokrasi, hak asasi manusia, lingkungan, hak atas kekayaan intelektual dan standar internasional. Diantara kelima aspek tersebut HaKI merupakan aspek yang paling mapan dan men-

dapatkan kekuatan hukum dalam era globalisasi, yaitu dengan dimasukkannya *Agreement Related Aspects of Intellectual Property Rights/ TRIPs* dalam Perjanjian pembentukan *World Trade Organization (WTO)*. Dengan demikian sistem perlindungan HaKI nasional tidak dapat melepaskan diri dari standar yang berlaku dalam sistem HaKI dunia sebagai yang disyaratkan dalam Perjanjian *TRIPs* tersebut di atas. Dicantumkannya ketentuan Pasal 39 seksi 7 yang mengatur *Protection Undisclosed Information* pada dalam *TRIPs* maka memperkuat pengakuan dunia internasional bahwa Rahasia Dagang merupakan bagian dari Hak atas Kekayaan Intelektual. Obyek Rahasia Dagang pada dasarnya adalah informasi karya intelektual manusia yang oleh pemiliknya sengaja dirahasiakan untuk melindungi kepentingannya.

Hak atas kekayaan intelektual (HaKI) umumnya dan Rahasia Dagang khususnya dewasa ini dikatakan merupakan aset bisnis serta merupakan bagian integral dari proses bisnis dalam rangka keberhasilan perdagangan. Pernyataan dari kalimat ini secara nalar dapat diterima mengingat untuk mendapatkan hak yang bernama HaKI seseorang memerlukan modal yang berupa biaya, pengorbanan waktu, tenaga dan pikiran. Hasil karya yang merupakan perwujudan dari kemampuan intelektual untuk memecahkan masalah di bidang teknologi ataupun perbaikan proses hasil industri yang dapat diproduksi maupun ciptaan atau rekaan yang memiliki nilai ekonomi dan nilai guna perlu mendapat perlindungan hukum. Hasil karya intelektual yang memiliki nilai ekonomi dan nilai guna tersebut merupakan hak milik yang dikuasai oleh pihak yang telah berhasil menemukannya/merancang atau menciptakan. Hak tersebut merupakan hak kebendaan walaupun bersifat immateriil.

Pengertian benda secara yuridis adalah sesuatu yang dapat menjadi obyek hak milik (lihat Pasal 499 KUHPerdata) dan selanjutnya yang dimaksud hak kebendaan menurut Soedewi adalah hak mutlak atas suatu benda

dan hak mutlak tersebut memberikan kekuasaan atas suatu benda dan dapat dipertahankan terhadap siapapun juga.⁶

Pemegang Hak atas Kekayaan Intelektual memiliki hak eksklusif yang berupa hak untuk melarang pihak lain yang tanpa persetujuannya mempergunakan haknya. Untuk tenggang waktu tertentu pemegang HaKI ini diberi kesempatan dan diberi perlindungan hukum untuk memproduksi hasil temuannya ataupun memberi persetujuan kepada pihak lain untuk memanfaatkan penemuannya. Dengan perkataan lain Pemegang HaKI, baik itu penemu, pencipta ataupun pendesain termasuk pemilik Rahasia Dagang dapat menggunakan sendiri atas haknya terutama dalam kegiatan perdagangan bahkan ada diantaranya dapat mengalihkan atau menyewakan haknya kepada pihak lain melalui perjanjian lisensi misalnya.

Pemilik atau pemegang Hak atas Kekayaan Intelektual apabila menghendaki keberadaan hak tersebut mendapat pengakuan hukum dengan konsekuensi, mereka harus bersedia mengungkapkan atau menginformasikan hasil temuannya kepada khalayak umum namun ada pula yang justru kebalikan dari kewajiban tersebut, mereka tidak bersedia mengungkapkan atau menginformasikan hasil temuannya.

Perlindungan hukum untuk paten misalnya, hal tersebut harus dilakukan mengingat peraturan perundangan yang berlakukan di Indonesia pemberian HaKI pada umumnya menganut sistem konstitutif. Untuk mendapat pengakuan yang bersifat konstitutif harus diadakan pemeriksaan substantif dan pemeriksaan substantif itu baru dilakukan manakala permintaan paten tersebut telah diumumkan tidak ada yang mengajukan keberatan. Sistem pemeriksaan ini di Indonesia menganut sistem pemeriksaan ditunda. Hal yang demikian ini diungkap oleh Hutahaen bahwa sistem paten dengan pemeriksaan juga terbagi menjadi dua kel-

ompok yaitu sistem pemeriksaan otomatis dan sistem pemeriksaan ditunda (*deferred examination*). Banyak negara kini mengubah sistemnya menjadi sistem pemeriksaan ditunda. UU Nomor 13 Tahun 1997 menganut sistem yang terakhir.

Berdasarkan UU Nomor 30 Tahun 2000 Tentang Rahasia Dagang, pemilik hak atas hasil karya yang berupa rahasia dagang justru meminta perlindungan hukum untuk dirahasiakannya informasi teknologi dan atau bisnis yang memiliki nilai ekonomi, termasuk di dalamnya meliputi metode produksi, metode pengolahan dan metode penjualannya. Informasi dianggap bersifat rahasia apabila informasi tersebut hanya diketahui oleh pihak tertentu atau tidak diketahui secara umum oleh masyarakat. Selanjutnya informasi dianggap memiliki nilai ekonomi apabila sifat kerahasiaan informasi tersebut dapat digunakan untuk kegiatan usaha yang bersifat komersial atau dapat meningkatkan keuntungan secara ekonomi. Namun di dalam penjelasan pasal demi pasal pengertian usaha tidak dijelaskan lebih lanjut. Menurut Pasal 1 UU Nomor 3 Tahun 1982 yang dimaksud usaha adalah setiap tindakan, perbuatan atau kegiatan apapun di bidang perekonomian yang dilakukan oleh setiap pengusaha untuk tujuan memperoleh laba atau keuntungan.

Rahasia Dagang yang dalam istilah asing dikenal sebagai *trade secret* atau kadang juga disebut dengan istilah *undisclosed information* adalah merupakan salah satu bentuk perlindungan hukum atas HaKI yang diperuntukkan khusus untuk lingkup metode produksi, metode pengolahan, metode penjualan atau informasi lain di bidang teknologi dan/atau bisnis yang memiliki nilai ekonomi dan tidak diketahui oleh masyarakat umum.

Rahasia Dagang adalah informasi yang tidak diketahui oleh umum di bidang teknologi

⁶ Sofwan, Sri Soedewi, 1974, *Hukum Perdata, Hukum Benda, Seksi Hukum Perdata Fakultas Hukum UGM, Yogyakarta*, halaman 34

⁷ Hutahaen, Ronald, 1999, *Prosedur Pemberian Paten*, Direktorat Paten, Dirjen Hak Atas kekayaan Intelektual (HAKI). Departemen Kehakiman RI, Jakarta. Halaman 8.

dan/atau bisnis, mempunyai nilai ekonomi karena berguna dalam kegiatan usaha dan dijaga kerahasiaannya oleh pemilik rahasia dagang. Bertolak belakang dengan ketentuan tentang paten, adanya publikasi ataupun pemberian informasi yang dilindungi secara rahasia dagang justru dapat menggugurkan kerahasiaan atas informasi dan perlindungan atas penemuan tersebut. Rahasia dagang tidak akan dipatenkan apabila penemuan yang memiliki kebaruan, langkah inventif dan dapat diproses dalam industri memiliki masa perlindungannya tidak terbatas selama informasi tetap terjaga kerahasiaannya dan tidak menjadi *public domain*. Bandingkan dengan paten masa perlindungannya hanya selama 20 tahun. Bagi penemu di bidang teknologi ini diberi kebebasan memilih alternatif perlindungan dalam bentuk Paten ataukah Rahasia Dagang. Pemegang hak paten dimungkinkan memiliki hak merek dan hak cipta sedangkan Rahasia Dagang tidak dimungkinkan memiliki hak cipta, karena hak cipta lahir apabila hasil karya itu telah diungkap kepada umum pada hal Rahasia Dagang justru informasi hasil temuan itu dirahasiakan. Contoh klasik adalah Coca Cola memiliki Rahasia Dagang dan Merek karena kerahasiaan ramuan minuman dapat terjaga untuk waktu yang diperkirakan lebih dari masa waktu 20 tahun dan untuk membedakan dengan minuman yang sejenis diberi tanda yaitu merek.

Kelemahan Rahasia Dagang adalah sangat rentan terhadap kebocoran informasi yang dirahasiakan (*disclosure*), namun kelemahan tersebut memberi inovasi dan mendorong pemilik Rahasia Dagang untuk mengembangkan langkah-langkah pengamanan pendukung tentang kerahasiaan informasi teknologi dan/atau bisnis tersebut. Selain dari pihak-pihak yang memiliki perjanjian melindungi kerahasiaan dengan pemilik informasi bila terjadi kebocoran kerahasiaan informasi dan/atau bisnis penegakan hukum bagi kebocoran rahasia adalah sangat sulit dibuktikan. Guna menjamin kepentingan pemilik rahasia serta untuk mencegah persaingan curang sebagaimana yang ditegas-

kan dalam pasal 10 bis Konvensi Paris (1967) oleh *WTO* ketentuan ini diperluas dan dituangkan dalam pasal 39 Persetujuan *TRIPs*. Ketentuan tersebut intinya melarang kepemilikan, penguasaan dan/atau penggunaan secara tidak layak/wajar atas suatu rahasia dagang atau informasi yang bersifat rahasia yang memiliki nilai komersial.

Ketentuan pasal 39 Persetujuan *TRIPs* undisclosed information mengandung dua muatan perlindungan hukum yang wajib dilindungi oleh setiap negara peserta *WTO*, yaitu *Trade Secret* atau Rahasia Dagang sebagaimana telah diuraikan di atas dan *Test Data* untuk pemasaran obat. Pemerintah atau peserta *WTO* berkewajiban melindungi terhadap pengungkapan (*disclosure*) dan *unfair commercial use* dari barang yang dipasarkan dan pengungkap tersebut perlu diberikan kepada publik.

VI. Penutup

Berdasarkan uraian di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa :

1. Dengan dicantumkannya ketentuan yang mengatur *Protection of Undisclosed Information* dalam Pasal 39 Persetujuan *TRIPs* memperkuat indikasi dan pengakuan internasional bahwa Rahasia dagang adalah termasuk jenis Hak atas Kekayaan Intelektual sebab secara substansi *undisclosed information* itu pada dasarnya sama dengan Rahasia Dagang.
2. Hak atas Kekayaan Intelektual pada umumnya dan Rahasia Dagang khususnya dewasa ini dikatakan merupakan aset bisnis serta merupakan bagian integral dari proses bisnis dalam rangka keberhasilan perdagangan.
3. Negara peserta Organisasi Perdagangan Dunia (*WTO*) berkewajiban melindungi penguasaan dan penggunaan Rahasia Dagang yang diperolehnya dengan cara yang tidak wajar.
4. Globalisasi tidak dapat dilepaskan dari

proses menguasai pasar skala dunia untuk dapat memasarkan hasil produk sebanyak-banyaknya. HaKI yang telah mendunia dalam perdagangan karena telah mapan dan mendapatkan tempat serta pengakuan

hukum dalam era globalisasi perdagangan di manfaatkan untuk penjualan barang ke negara lain tanpa rasa kekhawatiran barang ditiru.

DAFTAR PUSTAKA

- Cornish, W.R, 1989, *Intellectual Property*, Sweet & Maxwell, 2nd Edition, London.
- Hutahaen, Ronald, 1999, *Prosedur Pemberian Paten*, Direktorat Paten, Dirjen HaKI, Departemen Kehakiman RI, Jakarta.
- Mertokusumo, Sudikno, 1996, *Mengenal Hukum, Suatu Pengantar*, Penerbit Liberty, Yogyakarta.
- Soetiarto, Noegroho Amien, 1998, *Tinjauan Aspek Hukum Dalam proses Mematenkan Hasil Penelitian Perguruan Tinggi*, Makalah Sarasehan Sosialisasi HaKI dan Strategi Proses Mematenkan Hasil Penelitian Perguruan Tinggi, Lembaga Penelitian UGM, Yogyakarta.
- Sofwan, Sri Soedewi, 1974, *Hukum Perdata, Hukum Benda*, Seksi Hukum Perdata Fakultas Hukum UGM, Yogyakarta.
- Taylor, L.J., 1980, *Copyright For Librarian*, Tamarisk Books, Hasting, East Sussex, 1st Edition.